

**DECENTRALIZING GOVERNANCE:  
EMERGING CONCEPT AND PRACTICE**  
**Penulis: G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli**

**Sri Enny Mainiarti**

Email: enny.sri@gmail.com

**Information**

Index. (2007). In Cheema G. & Rondinelli D. (Eds.), *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices* (pp. 313-326). Brookings Institution Press. Retrieved January 26, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt1261v1.21>

**PENDAHULUAN**

Dua puluh lima tahun terakhir telah mengalami pergeseran signifikan dalam geopolitik, lingkungan global, globalisasi, keamanan, kemiskinan, dan ketidaksetaraan ekonomi. Pergeseran ini menciptakan tantangan baru dan peluang baru untuk bertindak. Tahun 1980-an, misalnya, menyaksikan gelombang baru dalam kesadaran lingkungan, yang berpuncak pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan — KTT Rio — pada tahun 1992. Pada tahun 1989, akhir perang dingin mengantar era baru geopolitik yang membawa memikirkan kembali kerjasama pembangunan. Pemerintahan memasuki leksikon kerjasama pembangunan sebagai sarana untuk menguji dan memahami lebih baik bagaimana politik dan kekuasaan mempengaruhi peluang dan hasil pembangunan. Konsep mata pencaharian berkelanjutan diperkenalkan segera setelah itu dan mendapat perhatian politik internasional pada KTT Rio. Tahun 1990-an menyaksikan banyak KTT PBB tentang berbagai tema kerjasama pembangunan dengan komitmen politik tingkat tinggi yang menyertainya untuk mengambil tindakan, mengubah perilaku, dan meningkatkan aliran sumber daya ke negara-negara miskin. Ini memuncak dengan publikasi, pada tahun 1996, *Shaping the 21st Century*, oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Komite Pengembangan Pembangunan, yang menguraikan cara-cara di mana perilaku donor harus berubah. KTT Milenium PBB pada tahun 2000 dan publikasi berikutnya dari Tujuan Pembangunan Milenium menawarkan serangkaian target pembangunan yang disepakati secara internasional dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan efektivitas bantuan.

Bab ini berfokus pada peran pemerintahan yang terdesentralisasi (artinya pemerintahan terdesentralisasi yang dicirikan oleh interaksi lokal yang efektif dengan organisasi masyarakat sipil) di negara-negara berkembang di era baru kerjasama pembangunan ini. Ini berpendapat bahwa pemerintahan yang terdesentralisasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi orang untuk mengubah hidup mereka dengan mengkonseptualisasikan kekuasaan melalui perluasan aturan hukum. Ini mengkaji aspek konstitutif pemerintahan terdesentralisasi, dan cara-cara yang dapat memperkuat aset dan strategi adaptif yang digunakan pria dan wanita untuk



mencari nafkah. Pengkajian kembali kerangka hukum yang mengatur alokasi dan perlindungan hak-hak kepemilikan dan tenaga kerja serta peluang bisnis bagi kaum miskin dapat membantu mereka untuk lebih mengendalikan mata pencaharian mereka. Digabungkan dengan pemerintahan yang terdesentralisasi, kerangka hukum ini memberikan titik masuk yang berguna untuk mengubah hubungan kekuasaan sehingga orang miskin dapat memperoleh manfaat tanpa melakukannya dengan mengorbankan orang lain.

### **Desentralisasi, Kekuasaan dan Kemiskinan**

Desentralisasi, yang didefinisikan sebagai "transfer otoritas politik, keuangan, administratif, dan hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah / sub-nasional dan lokal," memainkan peran penting dalam mengubah dinamika kekuasaan dan dalam mengatasi isu-isu pengurangan kemiskinan lokal.<sup>2]]] Desentralisasi yang berhasil memungkinkan peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam perencanaan masyarakat, pengembangan dan implementasi proyek, dan penyelesaian masalah, dan meningkatkan prospek keberlanjutan dan kepemilikan lokal. Secara teoritis, memungkinkan masyarakat lokal untuk lebih terlibat dalam pembangunan proses dan untuk memperkuat kapasitas mereka untuk pengambilan keputusan dengan memiliki akses yang lebih besar ke partisipasi politik lokal.</sup>

Agar desentralisasi dapat membantu kaum miskin secara efektif keluar dari kemiskinan, harus disertai dengan perubahan struktural mendasar dalam proses pengambilan keputusan yang mempertahankan hubungan kekuasaan yang asimetris dan dengan perubahan yang membawa pemerintah lebih dekat kepada rakyat. Membawa pemerintah lebih dekat kepada rakyat dapat dicapai dengan banyak cara. Salah satu memerlukan memberikan suara kepada orang miskin, menawarkan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, dan meningkatkan peluang mata pencaharian melalui investasi pemerintah dalam proyek pembangunan pro-kaum miskin. Meskipun perubahan ini harus memiliki hasil positif pada mata pencaharian masyarakat miskin, kenyataannya sangat berbeda. Hasil yang tidak diinginkan muncul dari hubungan kekuasaan miring antara elit miskin dan lokal yang memungkinkan yang terakhir untuk menangkap kontrol atas penyediaan barang dan jasa lokal. Tanggapan khas terhadap "penangkapan elit" adalah advokasi program pemberdayaan yang, karena hubungan kekuasaan yang miring, biasanya dikutuk sejak awal.

Hubungan antara kemiskinan dan kekuasaan jarang dibahas dalam studi tentang kerja sama pembangunan. Kekuasaan didefinisikan sebagai "bukan hanya sesuatu yang dipegang seseorang, melainkan sesuatu yang dimiliki seseorang atau tidak ada hubungannya dengan orang lain."<sup>4]]] Kemiskinan adalah gejala ketidaksetaraan kekuasaan karena mereka yang kurang memiliki kekuasaan sering kekurangan akses ke sumber daya dasar. Kemiskinan diciptakan, dipertahankan, dan sering diperburuk oleh hubungan kekuasaan di masyarakat karena hubungan sosial inilah yang menentukan bagaimana sumber daya didistribusikan di antara orang-orang. Jadi,</sup>



kemiskinan tercipta ketika batas yang kuat dari akses orang lain ke sumber daya yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Akibatnya, daya menjadi didefinisikan sebagai kontrol material.

Selain itu, kemiskinan dapat dikaitkan dengan “fanatisme terang-terangan terhadap kelompok miskin dan kelompok berkuasa rendah yang terkait dengan kemiskinan” karena kelompok dominan terus menyalahkan kemiskinan pada “defisit karakter orang miskin.” Prasangka kuat terhadap orang miskin (atau tidak berdaya) oleh orang kaya (atau berkuasa) semakin membatasi kekuatan orang miskin dan meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan kekuatan sebagai kapasitas orang miskin untuk mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan mereka .

Meskipun kekuasaan sering didiskusikan sebagai permainan zero-sum, adalah mungkin untuk merasakan kekuatan sebagai permainan positif-sum di mana setiap orang mendapat manfaat. Hasil positif “menjadi mungkin ketika ukuran pai entah bagaimana membesar sehingga ada lebih banyak kekayaan untuk didistribusikan di antara pihak-pihak daripada awalnya, atau beberapa cara lain dirancang sehingga semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan atau butuhkan.” Namun, mereka yang memiliki kekuatan tidak akan pernah rela melepaskannya. Inisiatif-inisiatif pembangunan yang membantu kaum miskin bertahan hidup di tingkat subsisten melalui proyek-proyek penghasil pendapatan dan program-program kesehatan dan pendidikan dasar, tentu saja, sering disambut, tetapi mereka diizinkan untuk berhasil karena mereka mempertahankan dan bahkan memperkuat hubungan kekuasaan yang ada.

Jika pemberdayaan nyata kaum miskin tampaknya berhasil, pendirian (mereka yang memegang kekuasaan formal) cenderung menghancurkan proses semacam itu dalam tahap yang baru dimulai. Bayangkan seorang pemilik perkebunan kehilangan tenaga kerja murah karena karyawannya dapat menjadi anggota serikat pekerja. Dia akan menggunakan "koneksi" untuk mencegah hal seperti itu. Yash Tandon juga mengungkapkan sudut pandang ini ketika dia menulis bahwa "kekuasaan tidak ada untuk memberi tetapi mengambil. Mereka yang 'memberi' kondisi kekuasaan; kekuasaan harus diambil."<sup>8</sup>]] Dengan demikian, tampak bahwa relasi kekuasaan diubah melalui proses pemberdayaan diri. Untuk mencapai perubahan dalam hubungan kekuasaan ini, kekuasaan harus direkonseptualisasikan sebagai permainan penjumlahan positif berdasarkan mekanisme yang membantu kaum miskin memberdayakan diri mereka sendiri dan pada saat yang sama menciptakan manfaat bagi “pendirian.”

Negosiasi dapat dilihat sebagai permainan zero-sum atau permainan positif-sum. Ini adalah permainan zero-sum ketika para pemain berusaha untuk membagi sejumlah sesuatu yang tetap, karena mereka hanya dapat meningkatkan bagian mereka dengan mengorbankan yang lain. Negosiasi juga dapat dipahami sebagai permainan positif-sum ketika aktor bekerja untuk “membuat kue lebih besar, sehingga semua aktor dapat memiliki bagian yang lebih besar.” Untuk memastikan bahwa negosiasi adalah



permainan yang positif, para pemain harus menganggap diri mereka sebagai mitra daripada musuh sehingga mereka dapat bekerja sama untuk "mencoba untuk bernegosiasi hasil yang saling menguntungkan." Aktor perlu "mencari solusi win-win yang inovatif dan asli" sehingga mereka dapat mengatasi "masalah". Kepedulian bersama, menciptakan pilihan untuk keuntungan kolektif dan menggunakan kriteria obyektif untuk memutuskan hasil." Perluasan aturan hukum dapat menawarkan akses yang lebih besar terhadap manfaat dan perlindungan hukum bagi kaum miskin dan peluang baru untuk mengurangi kemiskinan melalui tata kelola yang terdesentralisasi .

Desentralisasi pemerintah dapat meningkatkan kemungkinan hasil positif-sum dengan membawa kekuatan lebih dekat ke masyarakat lokal. Secara teoritis, desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menciptakan ruang di mana orang dapat menggunakan kekuatan politik yang lebih besar dengan memungkinkan mereka "untuk mengekspresikan pandangan mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan lokal." Meskipun desentralisasi dapat membawa hasil positif-hasil, ini tidak selalu terjadi. Orang dapat berpartisipasi di tingkat pemerintah lokal tetapi mungkin masih merasa terputus dari dan skeptis tentang tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan mengenai desentralisasi di Uganda menemukan bahwa meskipun orang merasa bahwa pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan lokal adalah permainan yang positif, pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi mereka merasa bahwa situasinya lebih dekat dengan permainan *zero sum*. Lebih jauh lagi, mereka percaya bahwa pemimpin tingkat yang lebih tinggi terus-menerus mendapatkan keuntungan dengan biaya mereka.<sup>14]]] Ini menyiratkan bahwa untuk desentralisasi untuk menciptakan situasi positif-sum, ada kebutuhan untuk transparansi yang lebih besar di semua tingkat pemerintahan. Pemimpin di tingkat yang lebih tinggi juga perlu memastikan bahwa ada komunikasi yang memadai dengan masyarakat setempat sehingga yang terakhir merasa bahwa pandangan dan ide mereka didengarkan dan ditindaklanjuti.</sup>

Pemberdayaan menyiratkan suatu perubahan dalam hubungan kekuasaan antara yang kuat dan yang tidak berdaya. Ini bukan proses yang netral karena dapat menciptakan masalah sosial dan perlawanan. Selanjutnya, pemberdayaan dapat menjadi permainan *zero-sum* dan permainan positif-sum. Sebagai contoh, pemberdayaan yang mensyaratkan redistribusi tanah atau kekayaan dari yang berkuasa hingga tidak berdaya dapat mengakibatkan sebagian orang kehilangan asetnya dan orang lain mendapat manfaat dari ini. Namun, jika pemberdayaan meningkatkan produktivitas dan pendapatan, itu mungkin tidak mengarah pada permainan *zero-sum*. Pemberdayaan yang menghasilkan pertumbuhan dalam kepercayaan diri dan kemampuan pribadi selain keuntungan materi adalah permainan yang positif juga, karena seseorang tidak harus kalah agar orang lain dapat memperolehnya.

Agar masyarakat dapat berkuasa, tindakan harus diambil untuk menghadapi "sifat kemiskinan multidimensional." Tindakan yang dapat secara efektif memerangi kemiskinan termasuk mengubah hubungan kekuasaan dalam masyarakat dan rumah tangga. Gerakan sosial adalah penting karena mereka fokus pada akar kemiskinan dan



ketidakberdayaan dan bekerja untuk menantang dan meningkatkan status quo. Masalah dengan pendekatan ini adalah bahwa gerakan sosial lebih rentan terhadap perlawanan dan perlawanan dari mereka yang berkuasa dan dapat memprovokasi kekerasan.

Memobilisasi orang-orang yang terpinggirkan untuk mengorganisasi diri dapat memperkuat tujuan mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Organisasi membantu mengatasi kelemahan yang timbul dari isolasi kaum miskin dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan kekuatan yang mereka butuhkan untuk secara efektif menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Organisasi berbasis komunitas yang berupaya mengurangi kemiskinan juga lebih efektif ketika keanggotaan dibatasi untuk orang miskin. Ketika semua anggota komunitas dimasukkan, organisasi cenderung "didominasi oleh minoritas kepentingan elit yang akan mengubah kegiatan organisasi demi kepentingan mereka sendiri." Sebuah organisasi komunitas seperti itu tidak dapat sepenuhnya menyediakan sarana untuk memungkinkan orang miskin memperbaiki situasi mereka; organisasi untuk orang miskin perlu dipimpin oleh orang miskin sendiri.

Meskipun di beberapa negara organisasi dapat diakui secara hukum jika mereka membentuk koperasi di bawah hukum koperasi, banyak organisasi terus bekerja secara informal untuk menghindari birokrasi dan kemungkinan campur tangan negara. Alasan utama untuk ini adalah bahwa organisasi orang-orang yang terpinggirkan dapat mengarah pada "difusi kekuasaan," dan pengorganisasian dapat terbukti sulit karena bertemu dengan resistensi dari politisi di tingkat yang lebih tinggi yang percaya bahwa beberapa kekuatan mereka saat ini akan didistribusikan kembali kepada orang miskin. Bahkan jika mereka terorganisir, orang miskin sering dicegah sepenuhnya berpartisipasi dalam pertumbuhan komunitas mereka.

Tata kelola terdesentralisasi terkait erat dengan tantangan dan peluang konseptual yang lebih luas. Desentralisasi memiliki banyak bentuk. Dekonsentrasi - pengalihan tanggung jawab administratif dari kementerian dan departemen pusat ke tingkat pemerintah daerah dan lokal - memungkinkan sedikitnya jumlah kekuasaan untuk ditransfer ke masyarakat setempat. Devolusi, di sisi lain, yang "ditujukan untuk menciptakan atau memperkuat unit-unit independen pemerintah dengan mengalihkan fungsi dan wewenang," memberikan kesempatan terbaik untuk partisipasi tingkat lokal. Devolusi dapat memainkan peran utama dalam mempromosikan diri-pemberdayaan dan mengubah hubungan kekuasaan antara kaya dan si miskin. Desentralisasi politik (istilah lain untuk devolusi) adalah transfer kekuatan politik yang memberi penduduk lokal peningkatan kekuatan pengambilan keputusan dalam masalah politik, sosial, dan ekonomi. Desentralisasi yang berhasil mendorong "kesejahteraan semua orang" dan menciptakan situasi di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbagi kekuasaan.

Desentralisasi membantu mempromosikan demokrasi dengan memungkinkan orang-orang di berbagai tingkat pemerintahan untuk memiliki suara dalam keputusan politik sambil memungkinkan "untuk representasi yang lebih besar dari berbagai kelompok politik, agama, sosial dan etnis." Hal ini juga dapat mendukung reformasi



demokratis dengan mendorong akuntabilitas dan legitimasi yang lebih besar dari pemerintah pusat. Dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, komunitas lokal menjadi semakin terlihat oleh pemerintah pusat dan dengan demikian berada dalam posisi yang lebih baik untuk memantau tindakan pejabat pemerintah dan meminta mereka bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat. Desentralisasi “memperkuat kapasitas pemerintah daerah” dengan memungkinkan mereka untuk mengambil fungsi yang biasanya diisi oleh pemerintah pusat dan memberikan warga kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi komunitas mereka. Desentralisasi memungkinkan orang miskin untuk menyuarakan pendapat mereka dan ide tentang keprihatinan masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam menciptakan solusi untuk masalah pembangunan lokal.

Namun, desentralisasi mungkin tidak berhasil mencapai tujuan-tujuan ini jika elit lokal merebut kekuasaan. Meskipun desentralisasi dapat meningkatkan kekuatan dan kendali pengambilan keputusan lokal, tetapi juga dapat mendistribusikan kembali kekuasaan dari pejabat pemerintah pusat ke elit lokal. Untuk mencegah hal ini, desentralisasi harus disertai dengan akuntabilitas pemerintah yang lebih kuat. Salah satu cara untuk mencapai akuntabilitas yang lebih besar adalah dengan menciptakan organisasi komunitas lokal yang terdiri dari anggota masyarakat umum dan partai oposisi dan kelompok masyarakat sipil yang bekerja untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan dan keputusannya.

Desentralisasi paling berhasil jika suatu negara memiliki pemerintahan pusat yang kuat dan sah dan jika orang lokal diberdayakan— “jika tidak, ia tidak mengandung nilai intrinsik untuk menjadi promotor alami dari pembangunan damai dan demokrasi.” Desentralisasi seharusnya memandang “sebagai bagian dari kerangka kerja untuk reformasi administrasi negara dan publik yang bertujuan untuk memberdayakan pemerintah daerah dan masyarakat secara hukum, teknis dan finansial untuk memenuhi kepentingan mereka” sementara pemerintah pusat tetap bertanggung jawab atas isu-isu negara yang lebih tinggi. Partisipasi masyarakat lokal dalam pemerintahan adalah penting untuk desentralisasi yang berhasil karena memungkinkan “layanan tingkat lokal untuk disesuaikan sesuai dengan preferensi lokal” dan pengetahuan lokal dan ide-ide yang akan diterapkan untuk menangani masalah masyarakat secara lebih efektif. Dengan desentralisasi, sumber daya lokal juga dapat digunakan secara lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal. Beberapa orang lokal bahkan mungkin lebih bersedia membayar pajak mereka jika mereka merasa bahwa mereka telah meningkatkan kendali atas penggunaan pendapatan publik.

### **Desentralisasi dan Pembagian Daya**

Sebagaimana terlihat dari pembahasan sebelumnya, desentralisasi terkait dengan pergeseran kekuasaan. Memang, desentralisasi dapat mengarah pada pemerintahan yang baik dan pengurangan kemiskinan hanya jika ia memperluas kekuasaan melalui aturan hukum. Dengan mengubah hubungan kekuasaan, desentralisasi dapat memungkinkan orang miskin untuk mendapatkan kehidupan yang berkelanjutan.





Desentralisasi, sebagai pengalihan tanggung jawab fungsional dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal, mengubah hubungan sosial dan struktur kekuasaan yang memengaruhi akses dan kepemilikan sumber daya oleh orang-orang. Untuk mempromosikan pembagian kekuasaan, perubahan konseptual dasar diperlukan dalam bantuan pembangunan dari fokus pada kebutuhan untuk fokus pada aset. Yang pertama menekankan peluang untuk kegiatan donor, dan tantangan untuk membuat bantuan lebih efektif. Yang terakhir dimulai dengan apa yang sudah atau mungkin dimiliki oleh orang miskin, dan berfokus pada bagaimana membantu mereka membangun kemakmuran mereka sendiri, dan dalam melakukan hal itu memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan orang miskin memang luar biasa, tetapi begitu juga potensi mereka untuk membantu diri mereka sendiri.

Peningkatan partisipasi lokal dalam pembuatan keputusan yang dirancang untuk memobilisir masyarakat menuju pemberdayaan diri berfungsi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat miskin. Ini dapat dilakukan melalui artikulasi masalah-masalah umum, diikuti oleh mobilisasi, penciptaan ruang politik, dan akhirnya, penggunaan hukum untuk menegaskan dan melindungi hak-hak yang baru diakui. Donor akan lebih baik mengenali potensi ini dan bekerja dengannya dengan merancang proyek-proyek pembangunan yang dimulai dengan penilaian aset orang miskin daripada penilaian kebutuhan mereka. Asumsi umum bahwa orang miskin tidak memiliki aset perlu dibuang.

Desentralisasi, disertai dengan perluasan hak legal untuk orang miskin, menghasilkan kondisi yang diperlukan untuk memfasilitasi pembagian kekuasaan, yang pada gilirannya memungkinkan mereka mengubah peluang menjadi mata pencaharian yang berkelanjutan, memberdayakan diri, dan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Keberlanjutan menyiratkan kapasitas untuk mengatasi dan memulihkan dari guncangan dan tekanan, dan untuk mendapatkan manfaat dari efektivitas ekonomi, integritas ekologi, dan keadilan sosial. Pendekatan mata pencaharian yang berkelanjutan menuntut model kerjasama pembangunan yang memberdayakan diri sendiri di mana orang miskin berusaha mengambil alih kekuasaan atas nasib mereka sendiri, daripada menjadi model kerja sama pada dasarnya antara donor dan pemerintah penerima. Ini bukan untuk meminimalkan peran dari entitas-entitas ini tetapi untuk memikirkannya kembali dalam beberapa cara yang agak mendasar.

Tersirat dalam pengertian pemerintahan yang terdesentralisasi karena pembagian kekuasaan menganggap desentralisasi bukan sebagai fenomena sentrifugal yang mengasumsikan transfer kekuasaan dari pusat, seperti dari pemerintah nasional ke lokal atau dari elit lokal ke orang miskin, tetapi sebagai struktur untuk pengambilan keputusan yang luas dan inklusif. Desentralisasi dapat membantu membalikkan tren-tren eksklusif melalui intervensi yang ditargetkan dari bawah ke atas. Dengan demikian, strategi yang layak harus tersedia bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses yang mengidentifikasi aset dan hambatan yang ada menuju mobilitas ke atas. Memperluas kedaulatan hukum menciptakan lingkungan yang



memungkinkan di mana peluang untuk pembagian kekuasaan yang terdesentralisasi dipahami sebagai permainan positif-hasil, yang mengarah ke pemberdayaan diri. Dalam konteks inilah kami menggunakan pelajaran yang dipetik dalam tata kelola terdesentralisasi, yang diuraikan di bagian lain dalam buku ini, untuk memeriksa perannya dalam mempromosikan mata pencaharian yang berkelanjutan di negara-negara miskin namun negara-negara yang tertata baik, negara-negara gagal dan rapuh, dan negara-negara berpenghasilan menengah.

## **PENUTUP**

Atas hasil Ini berargumentasi untuk perubahan dalam bantuan pembangunan yang berfokus pada aset orang miskin dan pada penggunaan sistem hukum yang lebih inklusif untuk membantu orang miskin menggunakan aset lokal untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan kekayaan. Ini menjelaskan beberapa cara khusus untuk memperluas inklusivitas hukum di bidang properti dan hak-hak tenaga kerja, untuk meningkatkan organisasi bisnis, dan untuk mempromosikan sistem keadilan yang pro-masyarakat miskin. Desentralisasi dianggap sangat penting dalam membantu menetapkan sistem hukum inklusif semacam itu — sistem di mana orang miskin dapat membantu menciptakan kemakmuran melalui pengakuan hukum atas aset mereka, hak, dan kegiatan di mana mata pencaharian mereka didasarkan.

